



RudyCT Academic Series

EKONOMI POLITIK KONTEMPORER

Pasar, Negara, dan Elite: Refleksi atas Ekonomi Politik Kontemporer

Oleh: Rudy C Tarumingkeng



1. TIGA POROS UTAMA



PASAR

Mekanisme harga, inovasi, dan kompetisi



NEGARA

Regulasi, kebijakan, dan kepentingan publik



ELITE

Kekuasaan, jaringan, dan pengaruh

2. ISU KONTEMPORER



1

KETIMPANGAN

Distribusi kekayaan dan peluang yang tidak merata



2

OLIGARKI

Konsentrasi kekuasaan ekonomi dan politik



3

KAPITALISME DIGITAL

Platform, data, dan ekonomi berbasis teknologi



4

KEBIJAKAN PUBLIK

Desain, implementasi, dan evaluasi kebijakan negara



5

GLOBALISASI & GEOPOLITIK

Ketegangan, kerja sama, dan restrukturisasi kekuatan global



Siapa mengendalikan sumber daya?



Siapa diuntungkan dari kebijakan?



Bagaimana pasar diatur demi kepentingan publik?

4. ARAH REFLEKSI



KEADILAN

Mewujudkan distribusi manfaat ekonomi yang adil dan inklusif.



PRODUKTIVITAS

Mendorong inovasi, efisiensi, dan daya saing berkelanjutan.



DEMOKRASI

Memperkuat partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.



KEBERLANJUTAN

Menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

“ Ekonomi politik bukan sekadar tentang pertumbuhan, tetapi tentang siapa yang berkuasa, bagaimana keputusan dibuat, dan untuk siapa masa depan dibangun. ”



ANALISIS KRITIS



DATA & EVIDENSI



PERSPEKTIF MULTIDIMENSI



SOLUSI UNTUK KEPENTINGAN PUBLIK



MEMAHAMI DINAMIKA KEKUASAAN, MERUMUSKAN KEBIJAKAN, MEMBANGUN MASA DEPAN



*Rudy C Tarumingkeng: Pasar, Negara, dan Elite - Refleksi atas Ekonomi
Politik Kontemporer*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyclt75@gmail.com

15 Juni 2026

Kajian Akademik:

PASAR, NEGARA, DAN ELITE: REFLEKSI ATAS EKONOMI POLITIK KONTEMPORER

Abstrak

Artikel ini membahas relasi dinamis antara pasar, negara, dan elite dalam ekonomi politik kontemporer. Titik tolaknya adalah bahwa pasar tidak pernah berdiri sendiri sebagai mekanisme netral, melainkan selalu dibentuk oleh institusi, hukum, kapasitas negara, struktur kepemilikan, dan konfigurasi kekuasaan. Negara tidak sekadar “wasit” yang menjaga aturan permainan, tetapi juga aktor pembangunan, pengatur risiko sistemik, penyedia barang publik, dan arena perebutan kepentingan. Sementara itu, elite—baik elite ekonomi, politik, birokratik, teknokratik, maupun digital—memiliki peran ambivalen: mereka dapat menjadi penggerak investasi dan inovasi, tetapi juga dapat melakukan pemburuan rente, penangkapan regulasi, konsentrasi aset, dan penyempitan ruang demokrasi. Dalam konteks global, perlambatan pertumbuhan, fragmentasi perdagangan, ketimpangan kekayaan, krisis iklim, digitalisasi, dan kebangkitan AI memperlihatkan bahwa kapitalisme abad ke-21 tidak hanya menghadapi persoalan efisiensi, tetapi juga persoalan legitimasi. IMF memperkirakan pertumbuhan global 2026 berada pada 3,1% dan 2027 pada 3,2% dalam bayang-bayang konflik geopolitik, sementara Bank Dunia menekankan pelemahan perdagangan global dan ketidakpastian kebijakan sebagai risiko utama. ([IMF](#)) Dalam konteks Indonesia, data BPS menunjukkan Gini

Ratio September 2025 sebesar 0,363 dan tingkat kemiskinan 8,25%, sedangkan dokumen Bank Indonesia menampilkan narasi ketahanan makroekonomi dengan proyeksi pertumbuhan 2026 pada kisaran 4,9–5,7%. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Artikel ini menyimpulkan bahwa tantangan utama ekonomi politik kontemporer bukan memilih pasar atau negara secara dikotomis, melainkan membangun institusi yang mampu menundukkan pasar dan elite pada tujuan publik: produktivitas, keadilan, keberlanjutan, dan demokrasi substantif.

Kata kunci: *ekonomi politik, pasar, negara, elite, oligarki, institusi, ketimpangan, kapitalisme digital, Indonesia, demokrasi ekonomi.*

1. Pendahuluan

Ekonomi politik lahir dari kesadaran bahwa ekonomi bukan sekadar persoalan harga, produksi, konsumsi, investasi, dan pertumbuhan. Ekonomi selalu berkelindan dengan kekuasaan. Di balik angka pertumbuhan ekonomi terdapat pertanyaan: siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, siapa yang menentukan aturan, siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya, dan siapa yang mampu memengaruhi kebijakan publik. Karena itu, pembahasan tentang pasar, negara, dan elite merupakan pintu masuk penting untuk memahami dunia kontemporer.

Dalam teori ekonomi arus utama, pasar sering dipahami sebagai mekanisme alokasi sumber daya melalui harga dan kompetisi. Dalam kerangka ini, pasar dianggap efisien apabila pelaku ekonomi memiliki informasi cukup, hak milik terlindungi, transaksi berlangsung sukarela, dan tidak ada kekuatan monopoli. Namun, ekonomi politik mengajukan koreksi mendasar: pasar tidak pernah hadir dalam ruang kosong. Pasar membutuhkan hukum kontrak, perlindungan hak milik, infrastruktur, mata

uang yang stabil, lembaga peradilan, standar akuntansi, sistem keuangan, dan legitimasi sosial. Dengan kata lain, pasar adalah institusi sosial-politik, bukan hukum alam.

Negara juga tidak dapat dipahami hanya sebagai pengganggu pasar. Dalam sejarah pembangunan, negara berperan membentuk pasar, membangun infrastruktur, mendidik tenaga kerja, melindungi konsumen, menciptakan stabilitas makroekonomi, mengatur sektor keuangan, dan mengelola konflik distributif. Namun negara juga bukan aktor netral. Negara dapat menjadi instrumen kepentingan publik, tetapi dapat pula menjadi instrumen elite. Di sinilah persoalan utama ekonomi politik muncul: bagaimana memastikan negara cukup kuat untuk mengatur pasar, tetapi cukup akuntabel agar tidak ditangkap oleh kelompok kepentingan tertentu.

Elite menempati posisi strategis dalam relasi ini. Elite ekonomi menguasai modal, jaringan bisnis, aset produktif, dan akses pembiayaan. Elite politik menguasai legislasi, anggaran, kebijakan, dan representasi. Elite birokratik menguasai administrasi, izin, data, dan implementasi kebijakan. Elite teknokratik menguasai pengetahuan kebijakan. Elite digital menguasai platform, data, algoritma, dan infrastruktur komputasi. Dalam kapitalisme kontemporer, batas antar-elite ini semakin kabur. Seorang pebisnis dapat menjadi politisi; seorang pejabat dapat terhubung dengan korporasi; perusahaan teknologi dapat memengaruhi opini publik; dan lembaga keuangan dapat membentuk arah kebijakan negara.

Karena itu, judul "Pasar, Negara, dan Elite" tidak menunjuk tiga entitas yang terpisah, melainkan tiga poros yang saling membentuk. Pasar membutuhkan negara, negara dipengaruhi elite, elite memanfaatkan pasar, dan masyarakat berada di tengah relasi tersebut sebagai warga negara, pekerja, konsumen, pembayar pajak, pemilih, serta subjek pembangunan.

2. Kerangka Konseptual Ekonomi Politik

Ekonomi politik memandang bahwa pertumbuhan ekonomi dan distribusi kesejahteraan ditentukan oleh institusi. Douglass North menjelaskan institusi sebagai aturan main formal dan informal yang membentuk interaksi manusia, menurunkan ketidakpastian, dan memengaruhi biaya transaksi. ([American Economic Association](#)) Jika aturan main adil, transparan, dan dapat ditegakkan, pasar dapat bekerja relatif produktif. Sebaliknya, bila aturan main mudah dimanipulasi, pasar menjadi arena rente, spekulasi, monopoli, dan korupsi.

Dani Rodrik menekankan bahwa tidak ada satu cetak biru institusional yang berlaku universal bagi semua negara. Pasar membutuhkan institusi non-pasar, tetapi bentuk institusi tersebut harus sesuai dengan konteks historis, kapasitas negara, struktur sosial, dan pengetahuan lokal. Demokrasi, dalam pandangan Rodrik, berfungsi sebagai "meta-institution" karena menyediakan mekanisme untuk mengolah pengetahuan lokal dan mengoreksi kesalahan kebijakan. ([Springer](#)) Dengan demikian, pertumbuhan berkualitas tidak hanya bergantung pada liberalisasi pasar, tetapi pada kemampuan masyarakat membangun institusi yang adaptif.

Rodrik, Subramanian, dan Trebbi bahkan menunjukkan bahwa institusi memiliki posisi utama dibandingkan geografi dan integrasi ekonomi dalam menjelaskan perbedaan pembangunan antarnegara. ([Springer](#)) Pernyataan ini penting karena banyak negara berkembang sering didorong untuk membuka pasar, menarik investasi, dan memperluas perdagangan tanpa terlebih dahulu memperkuat hukum, birokrasi, kapasitas fiskal, dan akuntabilitas publik. Padahal, pasar yang terbuka dalam institusi yang lemah justru dapat memperluas dominasi kelompok yang sudah kuat.

Besley dan Persson menunjukkan bahwa kapasitas negara, terutama kapasitas hukum dan kapasitas fiskal, menentukan kemampuan negara membangun pasar dan memungut pajak. Negara yang tidak mampu menegakkan kontrak dan tidak mampu memobilisasi pendapatan publik akan sulit menyediakan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. ([American Economic Association](#)) Dalam konteks ini,

negara bukan hanya pembuat kebijakan, melainkan fondasi institusional bagi bekerjanya pasar.

Namun, Acemoglu dan Robinson mengingatkan bahwa perubahan institusi formal tidak otomatis mengubah struktur kekuasaan. Elite dapat berinvestasi dalam kekuasaan *de facto* untuk mempertahankan pengaruh meskipun lembaga politik berubah. Mereka menyebut kemungkinan “captured democracy”, yaitu demokrasi yang secara prosedural hidup tetapi kebijakan ekonominya tetap menguntungkan elite. ([American Economic Association](#)) Konsep ini sangat relevan untuk membaca banyak demokrasi kontemporer, termasuk negara-negara yang berhasil menyelenggarakan pemilu tetapi masih menghadapi konsentrasi ekonomi dan politik.

3. Pasar sebagai Mekanisme dan Arena Kekuasaan

Pasar sering digambarkan sebagai mekanisme impersonal. Harga dianggap mencerminkan kelangkaan, preferensi, dan produktivitas. Dalam praktik, pasar juga merupakan arena kekuasaan. Pelaku yang memiliki modal besar dapat mengendalikan pasokan, memengaruhi harga, membeli informasi, menguasai jaringan distribusi, dan menekan pesaing. Dalam pasar tenaga kerja, pekerja dan pemberi kerja tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang. Dalam pasar digital, platform besar dapat menguasai data, algoritma, akses konsumen, dan infrastruktur pembayaran.

Pasar yang kompetitif dapat mendorong inovasi, efisiensi, dan pilihan konsumen. Tetapi pasar yang terkonsentrasi dapat menghasilkan monopoli, oligopoli, eksploitasi pekerja, manipulasi informasi, dan ketimpangan. Karena itu, persoalan utama bukan apakah pasar baik atau buruk, melainkan kondisi institusional apa yang membuat pasar bekerja untuk kepentingan publik.

Dalam ekonomi politik kontemporer, pasar semakin bersifat global, finansial, dan digital. Perusahaan multinasional dapat memindahkan

produksi, laba, dan aset tidak berwujud lintas negara. OECD mencatat bahwa indikator base erosion and profit shifting memang menunjukkan penurunan moderat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi indikator tersebut tetap jauh lebih tinggi di investment hubs dibandingkan yurisdiksi lain, yang menunjukkan aktivitas BEPS masih berlangsung. ([OECD](#)) Ini memperlihatkan bahwa pasar global dapat melampaui kapasitas negara nasional, terutama dalam perpajakan dan regulasi.

Pasar digital memperdalam tantangan tersebut. Platform besar tidak hanya menjual barang atau jasa; mereka menguasai infrastruktur interaksi sosial, perdagangan, iklan, pembayaran, logistik, dan pengetahuan konsumen. Stanford AI Index 2026 mencatat bahwa investasi AI swasta Amerika Serikat pada 2025 mencapai US\$285,9 miliar, jauh melampaui investasi swasta AI Tiongkok sebesar US\$12,4 miliar, meskipun angka swasta saja mungkin meremehkan belanja yang didorong negara di Tiongkok. ([Stanford HAI](#)) Angka ini menunjukkan bahwa kekuatan pasar digital tidak tersebar merata, melainkan terkonsentrasi pada negara dan korporasi yang menguasai modal, talenta, data, dan komputasi.

4. Negara sebagai Pengatur, Pembangun, dan Arena Konflik

Negara memiliki tiga peran utama dalam ekonomi politik. Pertama, negara sebagai pengatur. Ia menetapkan aturan persaingan, perlindungan konsumen, standar lingkungan, tata kelola keuangan, dan perlindungan hak pekerja. Kedua, negara sebagai pembangun. Ia berinvestasi pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, teknologi, dan industrialisasi. Ketiga, negara sebagai arena konflik. Kelompok sosial berjuang memengaruhi anggaran, pajak, subsidi, izin, dan kebijakan sektoral.

Negara yang terlalu lemah membuat pasar dikuasai aktor kuat. Negara yang terlalu tertutup dan tidak akuntabel dapat berubah menjadi mesin rente. Karena itu, ekonomi politik menolak dua ekstrem: fundamentalisme

pasar dan absolutisme negara. Keduanya sama-sama berbahaya bila mengabaikan akuntabilitas, partisipasi, dan distribusi kekuasaan.

Dalam konteks global 2026, negara kembali menjadi aktor penting. Ketegangan geopolitik, perang, fragmentasi perdagangan, krisis energi, disrupsi rantai pasok, dan perubahan iklim memaksa negara melakukan intervensi lebih aktif. IMF mencatat bahwa ekonomi global menghadapi tekanan dari konflik, harga komoditas, inflasi, dan kondisi keuangan yang lebih ketat; risiko terutama membebani negara berkembang yang rentan. (IMF) Bank Dunia juga menekankan bahwa pertumbuhan perdagangan global diperkirakan melambat dari 3,4% pada 2025 menjadi 2,2% pada 2026 karena mudarnya front-loading dan dampak tarif. ([Open Knowledge Repository](#))

Dalam situasi seperti ini, negara tidak cukup hanya menjaga stabilitas makro. Negara harus membangun kapasitas adaptif: kemampuan membaca risiko global, melindungi kelompok rentan, mendorong produktivitas, mengelola transisi energi, dan menjaga kepercayaan pasar tanpa kehilangan orientasi sosial. Negara yang hanya mengejar stabilitas dapat terjebak dalam konservatisme kebijakan. Negara yang hanya mengejar ekspansi dapat kehilangan kredibilitas fiskal. Negara yang baik harus mampu menyeimbangkan keberanian transformasi dan disiplin institusional.

5. Elite: Antara Kepemimpinan dan Penangkapan Institusi

Elite tidak selalu negatif. Dalam banyak negara, elite bisnis, birokrasi, dan teknokratik dapat memainkan peran konstruktif. Mereka dapat mendorong investasi, membangun industri, menyusun kebijakan, menciptakan lapangan kerja, dan membawa teknologi baru. Namun, elite menjadi masalah ketika kekuasaan mereka tidak dikontrol oleh aturan publik.

Ada beberapa mekanisme penangkapan institusi oleh elite. Pertama, **regulatory capture**, yaitu ketika regulasi dibuat untuk melindungi

kepentingan industri tertentu, bukan kepentingan publik. Kedua, **rent-seeking**, yaitu pencarian keuntungan melalui izin, kuota, monopoli, subsidi, atau kedekatan politik, bukan melalui produktivitas. Ketiga, **policy influence**, yaitu kemampuan membentuk kebijakan melalui pendanaan politik, lobi, jaringan keluarga, atau akses eksklusif terhadap pejabat. Keempat, **information asymmetry**, yaitu penggunaan pengetahuan teknis atau data untuk mengarahkan kebijakan secara tidak transparan. Kelima, **revolving door**, yaitu perpindahan orang antara jabatan publik dan sektor privat yang menciptakan konflik kepentingan.

Dalam masyarakat demokratis, elite seharusnya tunduk pada hukum, kompetisi, transparansi, pajak, dan akuntabilitas publik. Namun, dalam demokrasi yang lemah, elite dapat mempertahankan dominasi melalui partai politik, media, pembiayaan kampanye, kepemilikan tanah, izin tambang, proyek infrastruktur, atau platform digital. Acemoglu dan Robinson menunjukkan bahwa elite dapat mempertahankan hasil ekonomi yang menguntungkan mereka meskipun institusi politik formal berubah. ([American Economic Association](#))

Di Indonesia, perdebatan tentang oligarki telah lama menjadi bagian penting studi ekonomi politik. Hadiz dan Robison menjelaskan bagaimana kekuasaan oligarkis tidak lenyap setelah perubahan politik, melainkan mengalami reorganisasi dalam institusi pasar dan demokrasi baru. ([Find an Expert](#)) Mietzner menambahkan bahwa autokratisasi di Indonesia dibatasi oleh penyebaran kekuasaan dan kompetisi antar-elite, tetapi elite tetap dapat bekerja sama melemahkan kualitas demokrasi selama kerangka rotasi kekuasaan tetap tersedia. ([Taylor & Francis Online](#)) Aspinall, Fossati, Muhtadi, dan Warburton juga membahas hubungan antara elite, massa, dan penurunan kualitas demokrasi Indonesia. ([Journal UGM](#))

6. Ketimpangan sebagai Masalah Ekonomi Politik

Ketimpangan bukan sekadar hasil berbeda dari kemampuan individu. Ketimpangan juga merupakan hasil struktur pasar, kebijakan pajak, kepemilikan aset, pendidikan, warisan, akses politik, dan desain institusi. World Inequality Report 2026 mencatat bahwa 10% penduduk teratas dunia memperoleh lebih banyak pendapatan daripada 90% penduduk lainnya, sedangkan 10% teratas menguasai sekitar tiga perempat kekayaan global; separuh terbawah populasi dunia hanya memiliki sekitar 2% kekayaan. ([World Inequality Report 2026](#))

Ketimpangan tinggi menimbulkan beberapa risiko. Pertama, risiko ekonomi: permintaan agregat melemah karena pendapatan terkonsentrasi pada kelompok yang kecenderungan konsumsinya lebih rendah. Kedua, risiko sosial: mobilitas sosial menurun dan rasa keadilan melemah. Ketiga, risiko politik: kelompok kaya dapat membeli pengaruh politik. Keempat, risiko epistemik: pengalaman hidup elite semakin jauh dari pengalaman masyarakat umum sehingga kebijakan kehilangan sensitivitas sosial.

Di Indonesia, BPS melaporkan Gini Ratio September 2025 sebesar 0,363, turun dari 0,375 pada Maret 2025 dan 0,381 pada September 2024. Gini perkotaan tercatat 0,383, sedangkan pedesaan 0,295. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Pada saat yang sama, tingkat kemiskinan September 2025 berada pada 8,25%, atau 23,36 juta orang. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Data ini menunjukkan perbaikan statistik, tetapi ekonomi politik menuntut pembacaan lebih dalam: apakah penurunan kemiskinan disertai peningkatan kualitas pekerjaan, produktivitas, perlindungan sosial, akses pendidikan, dan mobilitas antargenerasi?

Ketimpangan kontemporer juga semakin terkait dengan aset digital dan data. Perusahaan yang menguasai data pengguna, model AI, cloud, chip, dan platform distribusi dapat menciptakan konsentrasi keuntungan yang sulit ditandingi pelaku kecil. Ketimpangan bukan hanya antara kaya dan miskin, tetapi antara mereka yang memiliki infrastruktur digital dan mereka yang hanya menjadi pengguna.

7. Negara Kesejahteraan, Negara Pembangunan, dan Negara Oligarkis

Dalam praktik, terdapat beberapa model hubungan pasar-negara-elite.

Pertama, **negara minimalis**, yang menekankan deregulasi, privatisasi, dan pengurangan intervensi. Model ini dapat meningkatkan efisiensi dalam sektor tertentu, tetapi berisiko memperlemah perlindungan sosial dan memperbesar kekuasaan korporasi apabila institusi persaingan lemah.

Kedua, **negara kesejahteraan**, yang menggunakan pajak, layanan publik, asuransi sosial, dan regulasi tenaga kerja untuk mengoreksi ketimpangan pasar. Model ini membutuhkan kapasitas fiskal tinggi, kepercayaan publik, dan birokrasi yang efektif.

Ketiga, **negara pembangunan**, yang aktif mengarahkan industrialisasi, investasi, teknologi, dan ekspor. Model ini berhasil di beberapa negara Asia Timur karena kombinasi kapasitas birokrasi, disiplin kinerja, koordinasi negara-bisnis, dan orientasi ekspor. Namun, model ini dapat berubah menjadi kapitalisme kroni apabila insentif negara tidak disertai akuntabilitas.

Keempat, **negara oligarkis**, yaitu negara yang institusi formalnya bekerja tetapi arah kebijakan substantifnya banyak ditentukan kepentingan elite. Pemilu tetap ada, parlemen tetap bekerja, pasar tetap berjalan, tetapi akses terhadap izin, kredit, kontrak, proyek, dan regulasi sangat bergantung pada kedekatan politik.

Kelima, **negara digital**, yaitu negara yang semakin menggunakan data, platform, AI, dan sistem identitas digital untuk layanan publik. Model ini dapat meningkatkan efisiensi, tetapi juga dapat memperbesar pengawasan, diskriminasi algoritmik, dan ketergantungan pada vendor teknologi.

Keenam, **negara transisi hijau**, yaitu negara yang mengarahkan investasi menuju energi bersih, ekonomi sirkular, perlindungan biodiversitas, dan adaptasi iklim. Model ini membutuhkan koordinasi lintas sektor dan

keadilan transisi agar biaya perubahan tidak dibebankan pada kelompok miskin.

8. Kapitalisme Digital dan Kebangkitan Elite Baru

Kapitalisme digital mengubah hubungan pasar, negara, dan elite secara mendasar. Pada kapitalisme industri, kekuasaan ekonomi terutama bertumpu pada pabrik, mesin, tanah, pelabuhan, tambang, dan jaringan distribusi fisik. Pada kapitalisme digital, kekuasaan bertumpu pada data, algoritma, platform, cloud, chip, talenta AI, dan ekosistem aplikasi.

Elite digital berbeda dari elite ekonomi lama karena mereka tidak hanya menguasai produksi, tetapi juga menguasai mediasi. Mereka menentukan apa yang terlihat, apa yang direkomendasikan, apa yang viral, apa yang diukur, dan bagaimana perilaku konsumen diarahkan. Platform digital dapat menjadi pasar, media, infrastruktur pembayaran, ruang sosial, dan mesin iklan sekaligus.

UNCTAD menekankan bahwa negara berkembang masih menghadapi ketimpangan besar dalam ekonomi digital: pada 2024, ekspor layanan digital negara berkembang mencapai US\$1,1 triliun, tetapi hanya sekitar seperlima dari total global; dominasi pasar oleh segelintir perusahaan membatasi kompetisi dan menekan pemain lokal. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#)) Ini berarti ekonomi digital bukan otomatis demokratis. Digitalisasi dapat memperluas akses, tetapi juga dapat memperdalam ketergantungan.

AI memperbesar persoalan tersebut. OECD menyatakan bahwa prinsip AI yang diperbarui pada 2024 menekankan AI yang inovatif, tepercaya, menghormati hak asasi manusia, dan nilai demokratis. ([OECD](#)) Namun, prinsip normatif saja tidak cukup. Negara harus memiliki kapasitas teknis untuk mengaudit algoritma, melindungi data, mencegah monopoli, memastikan keamanan siber, dan menjamin bahwa manfaat AI tidak hanya dinikmati oleh perusahaan besar.

Dalam konteks pendidikan dan manajemen, AI harus dipahami sebagai alat produktivitas sekaligus medan ekonomi politik. Siapa yang memiliki data? Siapa yang menguasai model? Siapa yang membayar biaya komputasi? Siapa yang bertanggung jawab ketika algoritma bias? Siapa yang memperoleh keuntungan dari otomatisasi? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa AI bukan sekadar teknologi, melainkan institusi kekuasaan baru.

9. Indonesia: Stabilitas Makro, Tantangan Institusi, dan Politik Pembangunan

Indonesia memberikan contoh menarik tentang relasi pasar, negara, dan elite. Sebagai negara besar, demokratis, berpenduduk banyak, kaya sumber daya alam, dan berada di kawasan strategis Indo-Pasifik, Indonesia memiliki peluang besar menjadi kekuatan ekonomi menengah-atas. Namun, tantangannya juga besar: kualitas institusi, ketimpangan wilayah, produktivitas tenaga kerja, pendidikan, informalitas, tata kelola sumber daya alam, korupsi, dan konsentrasi kekuasaan ekonomi.

Dokumen Bank Indonesia Maret 2026 menampilkan narasi bahwa Indonesia memiliki ketahanan makroekonomi di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan 2025 disebut 5,11%, pertumbuhan 2026 diproyeksikan pada kisaran 4,9–5,7%, defisit fiskal 2026 diproyeksikan 2,68% PDB, dan cadangan devisa akhir Januari 2026 disebut US\$154,6 miliar. ([Bank Indonesia](#)) Dari sisi ekonomi politik, angka tersebut menunjukkan pentingnya kredibilitas fiskal, stabilitas moneter, dan koordinasi kebijakan.

Namun, stabilitas makro bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah stabilitas tersebut diterjemahkan menjadi transformasi produktif. Apakah investasi mendorong teknologi dan pekerjaan berkualitas? Apakah hilirisasi menciptakan rantai nilai domestik atau hanya memindahkan rente dari

ekspor bahan mentah ke oligopoli industri? Apakah proyek besar meningkatkan kapasitas nasional atau memperbesar ketergantungan pada elite proyek? Apakah belanja sosial meningkatkan kapabilitas manusia atau hanya menjadi instrumen politik jangka pendek?

Konteks Indonesia juga menunjukkan pentingnya kualitas demokrasi. Freedom House memberi Indonesia skor 56/100 dan mengklasifikasikannya sebagai "Partly Free". ([Freedom House](#)) Indikator semacam ini tidak boleh dipahami sebagai vonis final, tetapi sebagai peringatan bahwa demokrasi elektoral perlu diperkuat menjadi demokrasi substantif. Demokrasi substantif berarti warga tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga memiliki akses informasi, perlindungan hukum, ruang kritik, dan pengaruh nyata atas kebijakan publik.

10. Elite dan Oligarki dalam Demokrasi Pasca-Reformasi

Reformasi 1998 membuka ruang demokrasi, desentralisasi, kebebasan pers, dan kompetisi politik. Namun, banyak studi ekonomi politik menunjukkan bahwa perubahan formal tidak otomatis menghapus struktur kekuasaan lama. Hadiz dan Robison melihat bahwa oligarki di Indonesia mengalami reorganisasi, bukan lenyap. ([Find an Expert](#)) Dalam bahasa ekonomi politik, institusi baru sering diisi oleh aktor lama dengan strategi baru.

Desentralisasi memberi ruang partisipasi lokal, tetapi juga membuka peluang oligarki lokal. Pemilihan langsung dapat memperluas legitimasi, tetapi juga meningkatkan biaya politik. Biaya politik yang tinggi membuat kandidat bergantung pada sponsor, jaringan bisnis, atau dinasti. Akibatnya, kebijakan publik berisiko menjadi sarana pengembalian investasi politik.

Dalam banyak daerah, relasi antara izin usaha, pertambangan, perkebunan, konstruksi, pengadaan barang/jasa, dan pendanaan politik menjadi titik rawan. Pasar tidak berjalan murni berdasarkan produktivitas, melainkan berdasarkan akses. Negara tidak hanya mengatur, tetapi juga

mendistribusikan rente. Elite tidak hanya berkompetisi, tetapi juga bernegosiasi untuk mengamankan ruang akumulasi.

Namun, Indonesia tidak dapat direduksi menjadi oligarki total. Mietzner menekankan bahwa kekuasaan di Indonesia tersebar sehingga autokratisasi penuh sulit terjadi; kompetisi antar-elite tetap membatasi monopoli kekuasaan. ([IDEAS/RePEc](#)) Ini berarti Indonesia berada dalam situasi paradoks: demokrasi cukup kuat untuk mencegah konsentrasi kekuasaan tunggal, tetapi belum cukup kuat untuk memastikan akuntabilitas mendalam terhadap elite.

11. Pasar dan Negara dalam Hilirisasi, Industrialisasi, dan Transformasi Hijau

Salah satu agenda penting Indonesia adalah hilirisasi sumber daya alam. Secara teoritis, hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah, memperluas basis industri, menciptakan pekerjaan, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Namun, ekonomi politik mengingatkan bahwa hilirisasi tidak otomatis menciptakan pembangunan inklusif.

Hilirisasi dapat berubah menjadi kebijakan elite apabila hanya menguntungkan kelompok pemegang izin, pemodal besar, dan mitra asing tertentu. Sebaliknya, hilirisasi dapat menjadi strategi pembangunan apabila disertai transfer teknologi, standar lingkungan, pengembangan pemasok lokal, peningkatan keterampilan tenaga kerja, pengawasan kompetisi, dan pembagian manfaat untuk daerah.

Dalam dokumen Bank Indonesia, industri hilir disebut menarik investasi Rp584,1 triliun pada 2025 atau 30,2% dari total investasi, terutama didorong mineral dan batu bara. ([Bank Indonesia](#)) Angka ini besar, tetapi pertanyaan ekonomi politiknya adalah: bagaimana distribusi manfaatnya? Apakah daerah penghasil memperoleh kualitas hidup lebih baik? Apakah kerusakan lingkungan dihitung dalam biaya ekonomi? Apakah pekerja

memperoleh keterampilan baru? Apakah struktur industri menjadi lebih kompetitif atau justru lebih terkonsentrasi?

Transformasi hijau juga merupakan medan ekonomi politik. Negara perlu mengarahkan investasi pada energi bersih, transportasi publik, konservasi hutan, ekonomi sirkular, dan adaptasi iklim. Tetapi transisi hijau dapat ditangkap elite apabila subsidi hijau, kredit karbon, proyek energi, dan izin lahan dikuasai kelompok tertentu. Karena itu, transisi hijau harus disertai transparansi, partisipasi masyarakat lokal, perlindungan masyarakat adat, dan audit lingkungan independen.

12. Fiskal, Pajak, dan Kontrak Sosial

Pajak adalah inti kontrak sosial. Negara yang memungut pajak harus memberikan layanan publik, perlindungan sosial, infrastruktur, dan keadilan hukum. Warga yang membayar pajak berhak menuntut akuntabilitas. Dalam negara modern, kapasitas fiskal menentukan kapasitas pembangunan.

Namun pajak juga merupakan medan kekuasaan. Kelompok kaya dapat menggunakan celah hukum, insentif, offshore structures, transfer pricing, atau pengaruh politik untuk menurunkan beban pajak. OECD menunjukkan bahwa pendapatan pajak korporasi sebagai bagian total penerimaan pajak meningkat pada 2022, tetapi aktivitas BEPS masih tetap terlihat pada investment hubs. ([OECD](#)) Hal ini menunjukkan bahwa negara nasional menghadapi tantangan besar dalam memajaki kapital global.

Bagi Indonesia, agenda fiskal tidak hanya menambah penerimaan, tetapi juga memperbaiki legitimasi pajak. Masyarakat akan lebih bersedia membayar pajak bila melihat belanja publik efektif, korupsi ditekan, layanan membaik, dan elite tidak memperoleh perlakuan istimewa. Sebaliknya, kepatuhan pajak melemah bila warga melihat pajak dibayar oleh kelas menengah dan pekerja formal, sementara elite ekonomi memiliki banyak celah penghindaran.

Kontrak sosial fiskal menuntut tiga prinsip. Pertama, **keadilan vertikal**, yaitu mereka yang lebih mampu membayar lebih besar. Kedua, **keadilan horizontal**, yaitu pelaku dengan kemampuan sama membayar beban yang setara. Ketiga, **keadilan intergenerasional**, yaitu utang publik tidak boleh membebani generasi mendatang tanpa menghasilkan aset produktif.

13. Demokrasi Ekonomi dan Kualitas Pertumbuhan

Pertumbuhan ekonomi penting, tetapi pertumbuhan tidak selalu berkualitas. Pertumbuhan dapat tinggi tetapi rapuh, eksklusif, ekstraktif, atau merusak lingkungan. Pertumbuhan berkualitas harus memenuhi lima kriteria.

Pertama, **produktif**, yaitu didorong oleh peningkatan teknologi, keterampilan, infrastruktur, dan efisiensi, bukan hanya konsumsi atau eksploitasi sumber daya alam. Kedua, **inklusif**, yaitu membuka kesempatan bagi kelompok miskin, daerah tertinggal, UMKM, perempuan, dan generasi muda. Ketiga, **berkelanjutan**, yaitu tidak mengorbankan ekosistem dan stabilitas iklim. Keempat, **resilien**, yaitu mampu menghadapi krisis global, pandemi, perang, dan disrupsi teknologi. Kelima, **demokratis**, yaitu kebijakan ekonomi dapat diperdebatkan secara terbuka dan tidak dimonopoli elite.

Demokrasi ekonomi tidak berarti semua keputusan bisnis diambil melalui pemungutan suara. Demokrasi ekonomi berarti struktur ekonomi tidak boleh menghasilkan dominasi yang meniadakan kebebasan substantif warga. Warga harus memiliki akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, perlindungan sosial, informasi, dan ruang partisipasi. Pasar boleh menghasilkan perbedaan pendapatan, tetapi tidak boleh menciptakan kasta ekonomi yang menutup mobilitas sosial.

Dalam kerangka manajemen, demokrasi ekonomi juga relevan bagi organisasi. Perusahaan modern tidak cukup mengejar profit. Mereka harus memperhatikan tata kelola, keberlanjutan, hak pekerja, keamanan data,

dampak sosial, dan legitimasi publik. Perusahaan yang mengabaikan dimensi sosial-politik akan menghadapi risiko reputasi, regulasi, konflik pekerja, boikot konsumen, dan kehilangan kepercayaan.

14. Refleksi Manajerial: Apa Artinya bagi Pemimpin Organisasi?

Bagi pemimpin bisnis dan organisasi publik, ekonomi politik bukan wacana abstrak. Ia memengaruhi strategi, risiko, investasi, reputasi, dan keberlanjutan organisasi. Ada beberapa implikasi manajerial.

Pertama, pemimpin harus memahami bahwa regulasi bukan sekadar hambatan, tetapi bagian dari lingkungan strategis. Perusahaan yang hanya mencari celah regulasi mungkin memperoleh keuntungan jangka pendek, tetapi kehilangan legitimasi jangka panjang.

Kedua, pemimpin perlu membaca kekuasaan dalam pasar. Siapa pemasok dominan? Siapa penguasa platform? Siapa pembuat standar? Siapa pemilik data? Siapa aktor politik yang memengaruhi sektor? Analisis industri tidak cukup memakai kerangka kompetisi pasar; perlu ditambah analisis institusi dan kekuasaan.

Ketiga, organisasi harus membangun tata kelola etis. Konflik kepentingan, lobi gelap, pengadaan tidak transparan, manipulasi pajak, dan penggunaan data tanpa persetujuan dapat merusak organisasi dalam jangka panjang.

Keempat, pemimpin harus memahami bahwa AI dan digitalisasi bukan hanya proyek teknologi. Keduanya menyangkut hak data, bias algoritmik, ketimpangan keterampilan, keamanan siber, dan akuntabilitas keputusan otomatis.

Kelima, pemimpin perlu membangun kolaborasi publik-swasta yang sehat. Negara dan pasar harus bekerja sama dalam pendidikan vokasi, riset, infrastruktur, transisi energi, dan inovasi. Tetapi kolaborasi harus transparan agar tidak berubah menjadi kolusi.

15. Menuju Tata Kelola Ekonomi Politik yang Sehat

Tata kelola ekonomi politik yang sehat membutuhkan keseimbangan antara efisiensi pasar, kapasitas negara, dan akuntabilitas elite. Ada beberapa agenda penting.

Pertama, memperkuat **rule of law**. Hukum harus berlaku bagi semua, termasuk elite ekonomi dan politik. Tanpa kepastian hukum, pasar menjadi arena kedekatan, bukan produktivitas.

Kedua, memperkuat **kapasitas fiskal dan kualitas belanja**. Pajak harus lebih adil, basis pajak diperluas, penghindaran pajak ditekan, dan belanja diarahkan pada pendidikan, kesehatan, riset, infrastruktur, dan perlindungan sosial.

Ketiga, membangun **kebijakan persaingan** yang kuat. Monopoli dan oligopoli harus diawasi, baik di sektor tradisional maupun digital.

Keempat, memastikan **transparansi politik uang**. Pembiayaan politik harus terbuka agar kebijakan tidak menjadi utang politik kepada sponsor.

Kelima, memperluas **partisipasi publik**. Masyarakat sipil, kampus, media, serikat pekerja, asosiasi profesi, dan komunitas lokal harus memiliki ruang dalam proses kebijakan.

Keenam, memperkuat **governance AI dan data**. Negara perlu membangun kapasitas audit algoritma, perlindungan data, standar keamanan, dan etika penggunaan AI.

Ketujuh, menjalankan **transisi hijau yang adil**. Kebijakan iklim harus melindungi pekerja, masyarakat lokal, dan kelompok rentan.

Kedelapan, membangun **ekonomi pembelajaran**. Negara dan pasar harus diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, inovasi, dan produktivitas.

16. Kesimpulan

Pasar, negara, dan elite merupakan tiga poros utama ekonomi politik kontemporer. Pasar dapat menciptakan inovasi, efisiensi, dan kemakmuran, tetapi tanpa institusi yang kuat ia dapat menghasilkan konsentrasi kekayaan, eksploitasi, dan krisis. Negara dapat membangun kapasitas publik, mengoreksi kegagalan pasar, dan melindungi kelompok rentan, tetapi tanpa akuntabilitas ia dapat menjadi instrumen rente. Elite dapat memimpin transformasi, tetapi juga dapat menangkap institusi.

Tantangan abad ke-21 adalah membangun kapitalisme yang produktif tetapi tidak predatoris, negara yang kuat tetapi tidak otoriter, dan elite yang inovatif tetapi akuntabel. Dalam dunia yang diwarnai perlambatan global, ketimpangan, fragmentasi perdagangan, krisis iklim, dan kapitalisme digital, ekonomi politik perlu kembali menjadi pusat pembelajaran manajemen dan kebijakan publik.

Bagi Indonesia, agenda ke depan bukan hanya mempertahankan pertumbuhan sekitar 5%, tetapi memastikan bahwa pertumbuhan tersebut memperkuat produktivitas, memperluas mobilitas sosial, menyehatkan demokrasi, memperkuat negara hukum, dan mengurangi ketergantungan pada rente sumber daya. Masa depan ekonomi Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola hubungan pasar, negara, dan elite secara lebih adil, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Glossarium

Akuntabilitas: Kewajiban aktor publik atau privat untuk menjelaskan keputusan, menerima evaluasi, dan bertanggung jawab atas dampaknya.

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS): Praktik perusahaan multinasional memindahkan laba ke yurisdiksi pajak rendah untuk mengurangi kewajiban pajak.

Captured democracy: Demokrasi yang prosedurnya berjalan, tetapi kebijakan substantifnya banyak dikendalikan kepentingan elite.

Demokrasi ekonomi: Kondisi ketika warga memiliki akses adil terhadap kesempatan ekonomi, layanan publik, dan perlindungan dari dominasi ekonomi yang berlebihan.

Elite: Kelompok kecil yang memiliki akses istimewa terhadap modal, kekuasaan politik, jaringan sosial, pengetahuan, atau teknologi.

Elite capture: Situasi ketika sumber daya, kebijakan, atau institusi publik dikendalikan oleh kelompok elite untuk kepentingan sendiri.

Ekonomi politik: Kajian tentang hubungan antara proses ekonomi, kekuasaan politik, institusi, dan distribusi sumber daya.

Hilirisasi: Strategi meningkatkan nilai tambah komoditas melalui pengolahan lebih lanjut sebelum dijual ke pasar.

Institusi: Aturan formal dan informal yang membentuk perilaku ekonomi, politik, dan sosial.

Kapabilitas negara: Kemampuan negara merancang, membiayai, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan publik.

Kapitalisme digital: Bentuk kapitalisme yang berbasis platform, data, algoritma, cloud, AI, dan jaringan digital.

Ketimpangan: Perbedaan distribusi pendapatan, kekayaan, kesempatan, atau akses antarindividu atau kelompok.

Kontrak sosial fiskal: Hubungan timbal balik antara pajak yang dibayar warga dan layanan publik yang diberikan negara.

Monopoli: Kondisi ketika satu pelaku menguasai pasar dan dapat memengaruhi harga atau akses.

Oligarki: Konsentrasi kekuasaan ekonomi dan politik pada kelompok kecil yang mampu mempertahankan kepentingannya melalui institusi formal maupun informal.

Pasar: Mekanisme pertukaran barang, jasa, tenaga kerja, modal, dan informasi melalui harga, kontrak, dan kompetisi.

Pemburuan rente: Upaya memperoleh keuntungan melalui akses politik, izin, monopoli, atau perlindungan, bukan melalui produktivitas.

Regulatory capture: Penangkapan regulasi oleh kelompok yang seharusnya diatur sehingga regulasi melayani kepentingan mereka.

Rule of law: Prinsip bahwa hukum berlaku sama bagi semua dan ditegakkan secara adil.

State capacity: Kapasitas negara dalam hukum, fiskal, administrasi, dan koordinasi kebijakan.

Transisi hijau: Perubahan menuju ekonomi rendah karbon, efisien sumber daya, dan berkelanjutan.

Transparansi: Keterbukaan informasi yang memungkinkan publik mengevaluasi kebijakan dan keputusan.

Daftar Pustaka

(APA 7; DOI dicantumkan bila tersedia)

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2008). Persistence of power, elites, and institutions. *American Economic Review*, 98(1), 267–293. DOI: 10.1257/aer.98.1.267.

Aspinall, E., Fossati, D., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2020). Elites, masses, and democratic decline in Indonesia. *Democratization*, 27(4), 505–526. DOI: 10.1080/13510347.2019.1680971.

Bank Indonesia. (2026). *Republic of Indonesia presentation book: March 2026*. Bank Indonesia.

Besley, T., & Persson, T. (2009). The origins of state capacity: Property rights, taxation, and politics. *American Economic Review*, 99(4), 1218–1244. DOI: 10.1257/aer.99.4.1218.

BPS-Statistics Indonesia. (2026). *The Gini Ratio in September 2025 was 0.363*. BPS-Statistics Indonesia.

BPS-Statistics Indonesia. (2026). *In September 2025, the percentage of the poor population decreased to 8.25 percent*. BPS-Statistics Indonesia.

Freedom House. (2025). *Indonesia: Freedom in the World 2025 country report*. Freedom House.

Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). The political economy of oligarchy and the reorganization of power in Indonesia. *Indonesia*, 96, 35–57. DOI: 10.5728/indonesia.96.0033.

Hall, P. A., & Soskice, D. (2001). An introduction to varieties of capitalism. In P. A. Hall & D. Soskice (Eds.), *Varieties of capitalism: The institutional foundations of comparative advantage* (pp. 1–70). Oxford University Press. DOI: 10.1093/0199247757.003.0001.

International Monetary Fund. (2026). *World Economic Outlook, April 2026: Global economy in the shadow of war*. IMF.

Mietzner, M. (2025). The limits of autocratisation in Indonesia: Power dispersal and elite competition in a compromised democracy. *Third World Quarterly*, 46(2), 153–169. DOI: 10.1080/01436597.2024.2317970.

North, D. C. (1991). Institutions. *Journal of Economic Perspectives*, 5(1), 97–112. DOI: 10.1257/jep.5.1.97.

OECD. (2025). *Corporate tax statistics 2025*. OECD Publishing. DOI: 10.1787/6a915941-en.

OECD. (2024). *OECD AI principles*. OECD.

Piketty, T., & Saez, E. (2003). Income inequality in the United States, 1913–1998. *Quarterly Journal of Economics*, 118(1), 1–39. DOI: 10.1162/00335530360535135.

Rodrik, D. (2000). Institutions for high-quality growth: What they are and how to acquire them. *Studies in Comparative International Development*, 35, 3–31. DOI: 10.1007/BF02699764.

Rodrik, D., Subramanian, A., & Trebbi, F. (2004). Institutions rule: The primacy of institutions over geography and integration in economic development. *Journal of Economic Growth*, 9, 131–165. DOI: 10.1023/B:JOEG.0000031425.72248.85.

Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence. (2026). *The 2026 AI Index report*. Stanford University.

UNCTAD. (2024). *Digital Economy Report 2024*. United Nations Conference on Trade and Development.

World Bank. (2026). *Global Economic Prospects, January 2026*. World Bank.

World Inequality Lab. (2026). *World Inequality Report 2026*. World Inequality Lab.

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 15 Juni 2026. Author's account (Rudy C Tarumingkeng). <https://chatgpt.com/c/6a2f8035-4118-83ec-8225-4006ed4b836d>